



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISA DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN KETIMPANGAN
WILAYAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI
SUMATERA BARAT**

Oleh:

SYLVENKY PRYCO UZANTHA

06 151 040

*Mahasiswa Program Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Ekonomi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2011**

Analisa Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat

Skripsi S1 oleh: Sylvenky Pryco Uzantha Pembimbing Skripsi: Dr. Hefrizal
Handra, M.Soc.Sc

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah 15 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat selama periode 2002-2009. Adapun variabel-variabel yang diamati ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, angkatan kerja dan aglomerasi. Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah desentralisasi fiskal, angkatan kerja, dan aglomerasi. Sementara untuk ketimpangan wilayah variabel yang diteliti adalah desentralisasi fiskal, angkatan kerja, dan aglomerasi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi dari 15 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Hasil analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 15 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Sementara itu untuk ketimpangan wilayah, desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Selama 8 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Sumatera Barat secara empirik dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari 15 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat meningkat tiap tahunnya, tetapi grafik pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya justru meningkatkan ketimpangan wilayah yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena dimana terjadi banyak kasus dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak bisa selalu berjalan beriringan. Allen dalam Kuncoro (2004) menyatakan bahwa, sejarah perekonomian telah mencatat desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan pusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan penuh dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Semenjak pemerintahan orde baru berakhir, maka isu dan tuntutan tentang perimbangan wewenang pemerintah pusat dan daerah sangat deras mengalir, dan akhirnya UU No. 5 Tahun 1974 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Semenjak dilaksanakannya undang-undang ini banyak perubahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 juga memberikan perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari bentuk sentralistis menjadi desentralistis, dalam arti adanya pengalihan sebagian besar wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adapun wewenang yang tetap menjadi otoritas pemerintah pusat adalah di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, serta agama.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No. 22 / 1999. Praktek desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU No. 25/ 1999 yang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*Money Follows Functions*", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi kedua undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 22 tahun 1999) tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 25 tahun 1999) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Permasalahan yang muncul dalam penerapan kedua UU tersebut antara lain: belum jelasnya pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah, belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, masih terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.

Titik tolak desentralisasi di indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II), dengan tiga dasar pertimbangan, yaitu: Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis minim dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

relatif dapat lebih efektif dan yang terakhir adalah karena Dati II adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang mengetahui kebutuhan dan potensi rakyatnya.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan keuangan Pusat Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih selama sembilan tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai dengan 2010 masih mengalami kasus klasik yaitu, walaupun pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikan menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/kota, namun di sisi lain ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju.

Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,

2006). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah.

Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 yang memiliki PDRB yang bervariasi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dikabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat tahun 2009 sekitar Rp 36 miliar. PDRB kabupaten/kota tertinggi di Propinsi Sumatera Barat tahun 2009 dimiliki oleh Kota Padang sebesar Rp 11 miliar, di ikuti oleh Kabupaten Agam sebesar Rp 2,9 miliar, serta Kabupaten 50 Kota sebesar Rp 2,6 miliar. Sedangkan PDRB kabupaten/kota terendah dimiliki oleh Kota Padang Panjang dengan PDRB sebesar Rp 396 juta. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2009 berkisar diangka 5,45%, dimana laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Darmastra sebesar 6,67%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terkecil dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman sebesar 3,94% (BPS, 2009). Bervariasinya Pendapatan Regional Bruto Daerah di masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pengembangan sektoral yang berbeda antar daerah, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah, sumber-sumber penerimaan yang berbeda antar daerah.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan tidak serta merta menjadikan seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan PDRB secara bersamaan. Meskipun pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun hanya sebagian wilayah saja yang mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam atau *factor endowments*, letak geografis dan kebijakan pemerintah daerah. Kondisi *endowments factor* setiap daerah yang bervariasi berdampak terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan wilayah. Terjadinya migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal ke arah *core*, serta tidak berjalannya mekanisme

trickle down effect akan berdampak meningkatkan ketimpangan antar daerah (Hircman, 1970).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang semula ditujukan untuk memajukan dan mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah, justru akan terjadi sebaliknya yaitu akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi antar daerah setekah pelaksanaan desentralisasi fiskal, disinyalir terjadi peningkatan ketimpangan antar kabupaten/kota pada Propinsi Sumatera Barat. Tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di berbagai kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini berjudul tentang **“Analisa Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan mengenai:

1. Bagaimana dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat pada periode Tahun 2002-2009?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal mempengaruhi ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat pada periode Tahun 2002-2009?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis tingkat kesenjangan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, serta pemerataan ketimpangan antar wilayah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah, dan ketimpangan wilayah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, angkatan kerja dan aglomerasi di Propinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal dihitung dalam bentuk penerimaan daerah dan selanjutnya bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini dimulai dari tahun 2002-2009 dengan menggunakan data sekunder kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan dapat memberikan gambaran singkat mengenai skripsi ini menjadi enam bab yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan penelitian, serta ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan landasan teori. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum kondisi variabel-variabel yang akan digunakan di daerah penelitian.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan persamaan regresi berganda dengan data panel serta metode yang digunakan adalah GLS (*General Least Square*) dengan *Cross-Section Weight* dan *White Cross-Section* yang telah dilakukan untuk mengetahui Analisis Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat selama 8 tahun periode penelitian yaitu 2002-2009, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat selama pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2007 mengalami penurunan akibat krisis global yang melanda dunia dan tahun 2009 juga mengalami penurunan akibat gempa bumi yang menimpa Sumatera Barat. Dengan melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, maka pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat.
2. Tingkat ketimpangan/kesenjangan wilayah antar kabupaten/kota Sumatera Barat selama pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan melihat penurunan tingkat ketimpangan/kesenjangan wilayah dalam beberapa tahun terakhir, maka pelaksanaan desentralisasi fiskal berjalan baik dalam menurunkan kesenjangan wilayah. hal ini mengindikasikan bahwa terjadi pemerataan pembangunan di kabupaten/kota Sumatera Barat.
3. Uji regresi variabel independen desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat.

Peningkatan derajat desentralisasi fiskal menciptakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat menjadi lebih baik, namun belum merata.

4. Variabel independen angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat. Dengan tingginya penyerapan angkatan kerja akan meningkatkan kegiatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat yang lebih baik.
5. Variabel independen aglomerasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat. Peningkatan aglomerasi akan meningkatkan kegiatan konsentrasi ekonomi suatu daerah menjadi tinggi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat yang lebih baik.
6. Uji regresi variabel independen pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong penurunan ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera Barat, penurunan ini terjadi karena adanya pemerataan pembangunan.
7. Variabel independen desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera Barat. Peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong meningkatkan ketimpangan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat, namun belum merata.
8. Variabel independen angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera Barat. Dengan tingginya penyerapan angkatan kerja akan mendorong penurunan ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera Barat.
9. Variabel independen aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera Barat. Peningkatan aglomerasi akan

meningkatkan ketimpangan wilayah dimana proses pengkotaan yang bervariasi di tiap daerah akan mendorong semakin tingginya ketimpangan antar wilayah.

6.2 Saran

Adapun saran yang akan diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Propinsi di Propinsi Sumatera Barat, harus memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan ketimpangan wilayah masing-masing.
2. Pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Propinsi di Propinsi Sumatera Barat, harus memaksimalkan pertumbuhan ekonomi untuk dapat menurunkan ketimpangan wilayah wilayah masing-masing.
3. Pengembangan peningkatan daya serap angkatan kerja harus dioptimalkan oleh Pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Propinsi di Propinsi Sumatera Barat, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan ketimpangan wilayah masing-masing.
4. Peningkatan daya serap angkatan kerja harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan ketimpangan wilayah masing-masing.
5. Peranan Aglomerasi sebagai pusat konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah harus dioptimalkan oleh Pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Propinsi di Propinsi Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan ketimpangan wilayah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000. *Analisis Regresi Teori Kasus dan Solusi*. Edisi 2. Yogyakarta. BPFE.
- Angelia, Yuki. 2010. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Propinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Sumatera Barat Dalam Angka 2009*. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. Padang.
- Bellante, Jackson. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Wimandjaja, Edisi Kedua. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Uneversitas Gajah Mada.
- Bonet, Jaime. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: evidence from the Colombian experienc*. Original Paper. Ann Reg Sci 40:661-676.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta.
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. 2002. *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*. World Bank Institute.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multifariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. 2004. *Ekonometrika Dasar*. Edisi VI. Jakarta: Erlangga.
- Hartono, Budiantoro. 2008. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hirschman, Alberto. 1970. *Teori dan Praktek Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Jin, Jing dan Zou Heng-Fu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. World Bank Working Paper Series. Working Paper Series 1452.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.

- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pose et all. 2007. *Fiscal Decentralization, Efficiency and Growth. Department Of Geography and Environmental*. London School of Economics.
- Putong, I. 2003. *Ekonomi Mikro dan Makro*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Editor: Syamsudin Haris. Lembaga Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat–Daerah*.
- Siombing. Kartini H. 2008. *Pengaruh Aglomerasi. Modal. Tenaga Kerja dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Demak. Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Undip. Semarang.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Simanjuntak, Robert A. 2005. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Editor: Anhar Ganggang. Jakarta: yayasan Tifa.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang. Sumatera Barat.
- Slinko, Irina. 2002. *Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Municipalities and Growth Russian Regions*.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. 1994. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Suparmoko, M. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke Sembilan. Jakarta: Erlangga.
- Vasquez, Jorge Martinez dan Mc. Nab, Robert M. 2001. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. Working Papers. Andrew Young School of Policy Studies.
- Wahluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional.
- Woller, Gary M. dan Phillips, Kerk. 1998. *Fiscal Decentralization and LDC Economy Growth: An Empirical Studies*. Vol. 34, No. 4. Department Of Economics. Brigham Young Unverisity.